

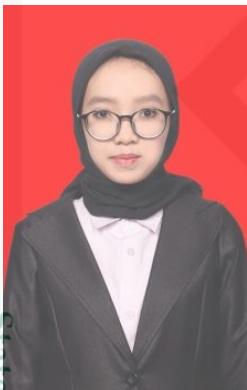


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN
KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
NEGERI BANGKINANG KELAS 1B**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

HUSNAINI FITRI

NIM. 11727201968

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1443 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB** yang ditulis oleh:

Nama : HUSNAINI FITRI

NIM : 11727201968

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru; 6 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH. MH
NIK. 13027038.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB"* yang ditulis oleh :

Nama : **HUSNAINI FITRI**
 NIM : 11727201968
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

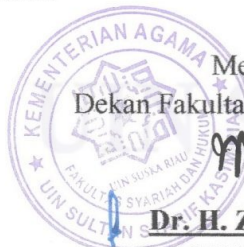
Ketua/Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris/Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji III
Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H

Penguji IV
Dr. H. Maghfirah, MA

[Handwritten signatures of the four examiners]



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

[Signature of Dr. H. Zulkifli, M. Ag]
Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HUSNAINI FITRI
 NIM : 11727201968
 Tempat/Tgl. Lahir : KAMPAR, 13 OKTOBER 1997
 Fakultas/Pascasarjana : SARAFAT DAN HUELEM
 Prodi : ILMU HUELEM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUELEM DALAM PENGOAMPINGAN KASUR
NAROTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN
MAKELAH ABUNG HOMOK 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN LAPANGAN HUELEM BAGI MAFARAKAT TIDAK MAMPU
DI PENGAJILAN NEGERI BANGELIHANG KELAC T B.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Oktober 2021

embuat pernyataan



HUSNAINI FITRI

NIM : 11727201968

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Husnaini Fitri, (2021): Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Pendampingan Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Pelaksanaan layanan bantuan hukum ini merupakan wujud dari hak konstitusional yang dijamin oleh Negara sebagaimana dijelaskan dalam muatan Undang-Undang Dasar 1945. Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pos bantuan hukum dalam kasus narkotika pada pos bantuan hukum belum terlaksana dengan optimal, diantaranya yaitu; (i) penerima layanan pos bantuan hukum tidak tepat sasaran, (ii) banyaknya kasus narkotika yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma.

Penelitian terhadap efektivitas hukum ini menggunakan jenis penelitian sosiologis hukum yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dan petugas pos bantuan hukum, serta 3 (tiga) data kasus Narkotika. Sifat penelitian ini deskriptif yang dituangkan dalam uraian secara logis dan sistematis. Teknik pengambilan sampel adalah *proposive sampling* yang menentukan kriteria tertentu untuk mewakili populasi. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal dikarenakan penerima layanan bantuan hukum bukan dari masyarakat tidak mampu. Sedangkan faktor pendorong diantaranya; (i) selalu siap memberikan layanan, (ii) melaksanakan sidang sesuai jadwal, dan faktor penghambat diantaranya; (i) masyarakat tidak tahu mengenai pos bantuan hukum, (ii) banyaknya kasus narkotika.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Shalawat dan salam terucap kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman yang gelap gulita ke zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelas Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati dan kerendahan hati yang paling dalam Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah H. Zainur, S.Pd dan Ibu Hj. Nurasni, S.Pd.I, serta Kakak Mega Khaironi Amk. Kep yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli , M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Asril, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H, M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahannya selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan banyak nasihat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Riska Widiani, S.H, M.H selaku ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB beserta Bapak dan Ibu Hakim serta pegawai lainnya yang telah mempermudah penulis dalam penelitian yang sangat diperlukan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Nurkhalidah Hamid, S.Pd yang telah memberikan support dan sarannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan support dan do'anya untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum D dan Ilmu Hukum (HTN) E, serta teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama dalam perkuliahan agar menjadi orang yang bermanfaat.

Tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini begitupun penulis yang tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 22 Oktober 2021

HUSNAINI FITRI
NIM. 11727201968

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar	17
B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkinang	
Kelas IB	19
C. Gambaran Umum Pos Bantuan Hukum Pengadilan	
Negeri Bangkinang Kelas IB	23
D. Gambaran Umum Peraturan Perundang-Undangan	
tentang Bantuan Hukum	26
BAB III TINJAUAN TEORITIS	30
A. Negara Hukum	30
B. Bantuan Hukum	33
C. Narkotika	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan	
kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan peraturan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu	39
B.	Faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.....	56
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	13
Tabel II. 1	Struktur Pos Bantuan Hukum	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	22
Gambar II. 2	Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945¹, tertuang amanat bahwa jaminan kepastian hukum untuk setiap warga negara dipelihara oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab dari Negara diatur dalam Pasal 34 ayat (11) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”*². Dapat ditafsirkan bahwa Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin³. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu wujud dari amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjelaskan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama/rata dihadapan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai Negara hukum yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang demikian itu harus ada jaminan bahwa hukum dibuat dan

¹ Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007), hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi⁴. Bantuan hukum merupakan konsep yang lahir atas dasar dari pemahaman yang dalam mengenai tujuan bermasyarakat yang sebetulnya hendak memerdekakan bangsa⁵.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum bermakna penting bagi perkembangan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, sebab hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus dilindungi. Prinsip perlakuan sama dihadapan hukum (*equality before the law*)⁶ yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik merupakan wujud Negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Penyediaan fasilitas oleh Negara salah satunya dalam bentuk pos bantuan hukum yang berada dilingkup peradilan. Posbakum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman⁷ sebagai realisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) tentang jaminan keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum. Dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu oleh posbakum dilingkup peradilan adalah surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dan sekarang diganti dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.87-88

⁵ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), hlm.39

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.124

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

State Islamic University of Sunan Yusif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu⁸.

Negara hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum⁹. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud dari pelaksanaan Hak Asasi manusia (HAM) yang salah satunya mengenai perlindungan dan persamaan dalam hukum, menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga Negara yang tidak mampu dalam ekonomi merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus implementasi Negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara akan akses kebutuhan terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)¹⁰. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak konstitusional orang atau kelompok yang ekonominya di bawah.

Dalam alquran dan hadis telah dijelaskan secara tegas bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara sesama manusia dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama didalam perkara-perkara kebajikan dan dilarang jika tolong menolong tersebut dilakukan untuk kemunkaran dan maksiat

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

⁹ Jandi Mukianto, *Op. Cit*, hlm.150

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm.125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada Allah swt, hal ini terdapat dalam alquran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya¹¹.

Ayat ini menjelaskan bahwa tolong-menolong atau memberikan bantuan antar sesama sangat dianjurkan oleh agama baik dalam hal yang bersifat duniawi maupun dalam hal yang bersifat ukhrawi. Hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang ekonominya di bawah maupun secara keilmuannya.

Pos bantuan hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri bagi advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan, bantuan pembuatan dokumen hukum, konsultasi hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

¹¹ Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung:CV. Media Fittah Rabbani Komplek Villa Bandung Indah, 2011), hlm.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bantuan hukum ini merupakan media yang digunakan oleh semua orang yang tidak mampu untuk menuntut haknya atas adanya tindakan yang berlawanan dengan kaidah hukum yang ada. Ini didasari oleh pentingnya perlindungan hukum untuk setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin penegakan hukum tersebut. Bantuan hukum tersebut bersifat membela masyarakat yang tidak memandang latar belakang, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan dan juga kaya atau miskinnya seseorang.

Pelaksanaan pos bantuan hukum ini khususnya pada kasus narkoba di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mewujudkan hak-hak konstitusional yang kesulitan untuk mengakses keadilan karena keterbatasan biaya. Kejahatan narkoba itu sendiri merupakan musuh bangsa sejak lama yang kini kian mengkhawatirkan. Berbagai cara penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahan narkoba dilakukan, karena ini adalah tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian atau pemerintah saja melainkan seluruh komponen masyarakat yang diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Sesuai dengan amanat dalam berbagai Perundang-Undangan Negara salah satunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba¹².

Hambatan utama bagi masyarakat yang tidak mampu untuk beracara di Pengadilan Negeri adalah berkaitan dengan biaya perkara. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang menggunakan jasa bantuan hukum di Pengadilan jika

¹² Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen Vol.II, Nomor 4, Agustus 2013, hlm.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilihat bukan termasuk golongan masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan¹³. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dalam penentuan penerima bantuan hukum pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Hakikatnya bantuan hukum yang diberikan Negara melalui Pengadilan dimana menyangkut lebih banyak perkara dimana terdakwa diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih bagi yang tidak mampu menyewa penasihat hukum dalam segi ekonomi untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan yang diberi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Bukan hanya itu ada juga beberapa masyarakat yang belum tahu pelaksanaan dari pos bantuan hukum yang dapat membantu mereka menyelesaikan perkaranya khususnya pada kasus narkoba jika mereka tergolong masyarakat yang tidak mampu secara finansial maka mereka dapat meminta layanan bantuan hukum dari pos bantuan hukum yang disediakan di Pengadilan Negeri Bangkinang. Dalam hal ini pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mencari keadilan.

Pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB khususnya pada pendampingan kasus narkoba ini kurang optimal dalam penentuan penerima layanan bantuan hukum sebab kurangnya pengawasan prosedur dalam menentukan penerima layanan bantuan hukum pada pos bantuan hukum dalam kasus narkoba. Fakta ini tidak sejalan

¹³ Yuanita Tarid, (Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB), Wawancara, 17 Desember 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan Pasal 22 mengenai penerima layanan bantuan hukum pada pos bantuan hukum di Pengadilan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terhadap masalah tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB.”**

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan yang akan penulis teliti adalah pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji agar memperoleh suatu hal setelah penelitian selesai dilakukan¹⁴, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas IB.

¹⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Panduan Akademik*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2011), hlm.12

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan memberikan wawasan kepada masyarakat pecinta hukum dan keadilan terutama yang berkaitan dengan masalah layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk beracara khususnya dalam kasus narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- b. Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan dalam kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Secara Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu¹⁵. Metode merupakan cara kerja memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yakni dengan cara peninjauan langsung ke lapangan¹⁶ untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.2

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat¹⁷.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah dan pembahasan peneliti, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, alamat Jl. Letnan Boyak No. 77, Langgini, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar Provinsi Riau. Kantor Sementara Jl. H.R Soebrantas (Komplek Perkantoran Bupati Lama) Bangkinang Kab. Kampar Provinsi Riau.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, antara lain:

a. Data Primer

Yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian¹⁸ baik melalui metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), maupun laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Yaitu fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹⁹.

¹⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.7

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.30

¹⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama²⁰.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi²¹ yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Metode sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh (sensus) dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, Sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang menjadi sampel atau subjek sumber data dalam penelitian ini adalah 2 orang hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, 1 orang petugas pos bantuan hukum, dan 3 kasus narkoba di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	13	2	15%
2.	Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	1	1	100%
3.	Kasus Narkoba di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	34	3	8,8%

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut :

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan penulis butuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dari dokumen yang dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi.

d. Studi pustaka

Studi pustaka adalah penulis mengambil beberapa buku-buku dan dokumen-dokumen referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti²².

²² Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), hlm.53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk memeriksa, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk memberikan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian ini analisa data secara kualitatif yakni cara untuk menghasilkan penelitian deskriptif dengan menganalisa data-data dan mengklarifikasi data berdasarkan kategori dengan menggunakan metode induktif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, Sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang, struktur organisasi, visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni tentang pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan faktor-faktor pendukung dan penghambat layanan pos bantuan hukum dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar lahir pada tanggal 06 februari 1950 yang tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan Undang-Undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor 3/DC/STG/50 tanggal 06 februari 1950.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan luas wilayah lebih kurang 11.289,28 km² atau 12,26% yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Utara	: Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Selatan	: Kabupaten Kuantan Singingi
Timur	: Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Barat	: Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ±413,5 km dengan kedalaman rata- rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m dimana jumlah penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan data kementerian dalam Negeri tahun 2020 berjumlah 790.313 jiwa²³.

²³ Data diperoleh dari Profil Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam, berdasarkan data kementerian dalam Negeri catatan kependudukan dan sipil hingga akhir tahun 2020 di Kabupaten Kampar mencatat bahwa pemeluk agama islam berjumlah 706.835 jiwa (89,44%), pemeluk agama kristen berjumlah 83.051 jiwa (10,51%), pemeluk agama protestan berjumlah 75.277 jiwa (9,53%) dan pemeluk agama katolik berjumlah 7.774 jiwa (0,98%) . Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 250 Desa. Adapun nama ke 21 Kecamatan tersebut adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai)
2. Bangkinang Kota (ibu kota: Bangkinang)
3. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian)
4. Kampar (ibu kota: Air Tiris)
5. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)
6. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar)
7. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)
8. Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
9. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
10. Kuok (ibu kota: Kuok)
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
13. Salo (ibu kota: Salo)
14. Siak Hulu (ibu kota : Pangkalan baru)
15. Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

16. Tapung (ibu kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (ibu kota: Kota Garo)
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat)
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
21. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis yang temperatur maksimalnya 32°C dengan memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan terutama dibidang pertanian dan perikanan darat²⁴. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Kampar adalah pertanian, perkebunan dan perikanan, hanya sebagian kecil yang bekerja dibidang lainnya.

Penduduk di wilayah Kabupaten Kampar sering disebut dengan istilah ughang ocu/orang ocu, dengan sebagian besar persukuan Domo, Melayu, Piliang/Piliang, Mandaliong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang. Pemerintahan wilayah Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh H. Catur Sugeng Susanto, S.H.

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Umum di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Negara hukum, lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa²⁵: “kekusaaan kehakiman dilakukan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terletak di jalan Letnan Boyak No. 77, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau²⁶.

Pengadilan Negeri bangkinang pada awalnya gedung terletak di jalan Prof. M. Yamin, SH bangkinang. seiring berkembangnya zaman dan hukum pada tanggal 17 Maret 1977 adanya DIP.NO.52/XIII/3/1977 tentang pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang di jalan Letnan Boyak yang dilaksanakan oleh PT.GIAM Pekanbaru dengan luas tanah 8.280 m² dan luas bangunan 624 m², dimana bangunan tersebut terdiri dari dua lantai dan berpilar empat buah²⁷.

Pada tanggal 23 Juli 1979 gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang diresmikan oleh Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Dep. Kehakiman yakni Soeroto, S.H.

Setelah Pengadilan Negeri Bangkinang dibentuk/didirikan yang secara praktis pada tanggal 26 Desember 1976 di wilayah Kabupaten Kampar dengan sarana dan prasarannya serta tenaga khusus yang bekerja sebagaimana mestinya sehingga wilayah Kabupaten Kampar penegakan hukum sudah dapat berjalan dengan semestinya.

²⁶ Data diperoleh dari Profil Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

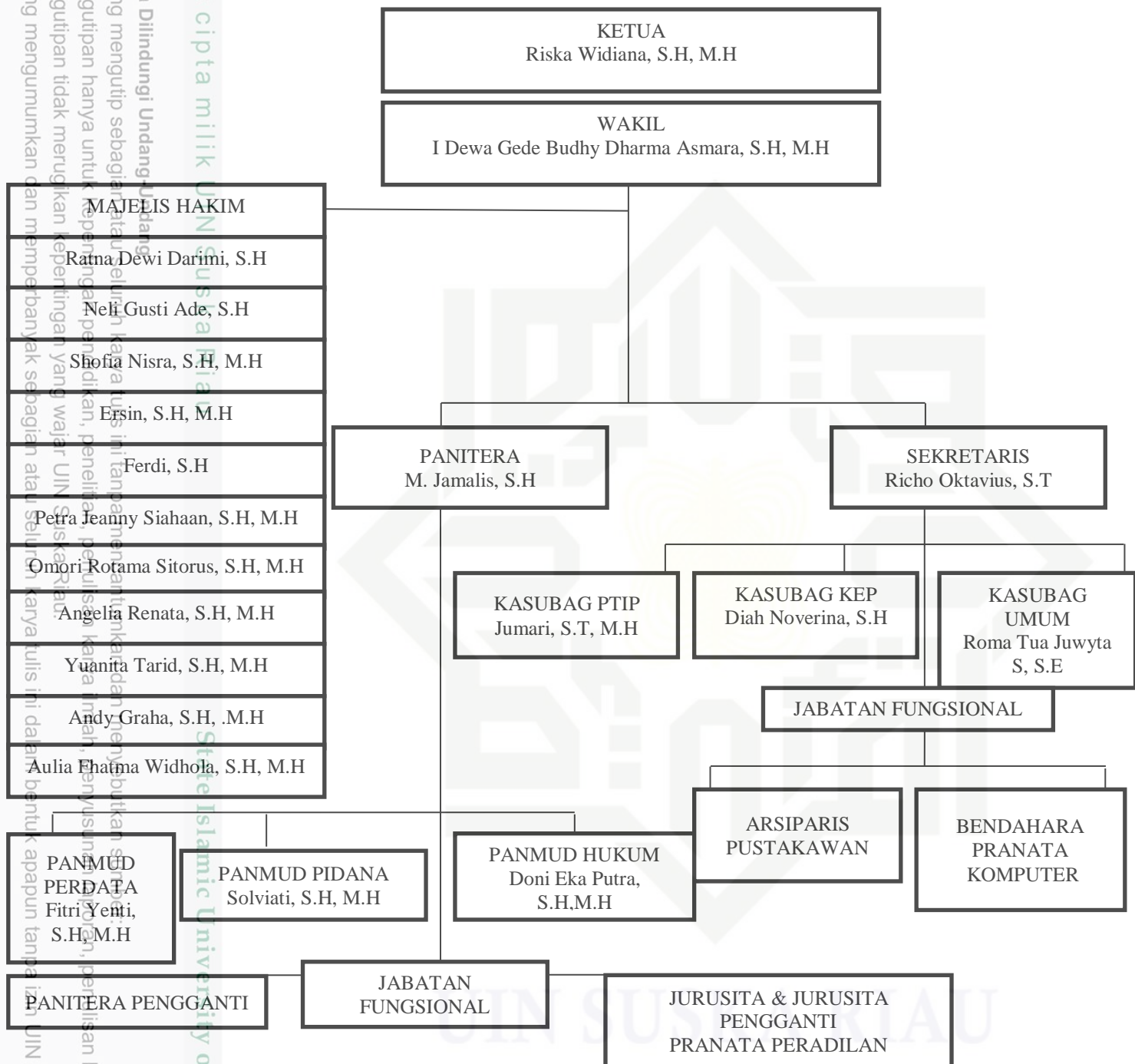
Sejak terbentuknya Pengadilan Negeri bangkinang Kelas IB adapun nama-nama ketua yang pernah menjabat sebagai berikut:

1. Abdul Razak, S.H
2. Anas Chas, S.H
3. H. Marsel Buchari, S.H
4. Pangeran Siregar, S.H
5. Bachid Noor, S.H
6. Sarpin Rizaldi, S.H
7. H. Ahmad Shalihin, S.H
8. Prim Haryadi, S.H, M.H
9. H. Achmad Dimiyati R.S, S.H, M.H
10. Toto Ridarto, S.H
11. Suharno, S.H, M.H
12. Ahmad Sumardi, S.H, M.H
13. Muhammad Arif Nuryanta, S.H, M.H
14. Lilin Herlina, S.H, M.H
15. Unggul Tri Esthi Muljono, S.H, M.H
16. Riska Widiyana, S.H, M.H (Sampai Sekarang)

Susunan pada Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Pengadilan Negeri, Majelis Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita.

Berikut struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB:

Gambar II. 1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB



Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB (2021)

C. Gambaran Umum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Layanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 sampai sekarang²⁸. Dalam jangka waktu tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sangat diperlukan dengan harapan adanya peningkatan atau intensitas dari pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Bantuan hukum yang dimaksud dalam layanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah bantuan jasa berupa memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk menyelesaikan perselisihan, bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap seorang disangka/didakwa²⁹.

Arah kebijakan dari program bantuan hukum ini disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat juga bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta kepatuhan hukum dimasyarakat melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal kepentingan hukum di Pengadilan.

Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB bekerjasama dengan lembaga pemberi layanan pos bantuan hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang di ketuai oleh Hj. Tatin

²⁸ Data diperoleh dari Website Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tentang Pos Bantuan Hukum

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Suprihatin, S.H pada Kamis tanggal 17 Januari 2019, sekaligus sebagai petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan dibantu oleh beberapa advokat lainnya. Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan berdasarkan dengan³⁰:

1. Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Pasal 13 ayat (1) tentang organisasi, administrasi dan finansial.
3. Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
4. Pasal 37 tentang setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Pasal 56 ayat (1 dan 2) tentang tersangka dan terdakwa.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu³¹.

Pelaksanaan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB khususnya pada kasus narkoba (pidana khusus) yang terjadi pada tahun 2019. Layanan ini diberikan pada masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, yakni : memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu

³⁰ Undang-Undang Dasar 1945

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat, memiliki surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti:

1. Kartu Keluarga Miskin (KKM).
2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat.
3. Kartu Beras Miskin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
5. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan.

Masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut akan diberikan haknya untuk menyelesaikan perkara dengan biaya cuma-cuma atau gratis dengan dakwaan minimal lima (5) tahun atau lebih. Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan akan menyediakan advokat/kuasa hukum yang akan membela atau menemani sampai perkara tersebut selesai.

Dengan adanya layanan pos bantuan hukum yang disediakan pemerintah pada setiap Pengadilan, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam menyelesaikan suatu perkara.

Tabel II.1
Struktur Pos Bantuan Hukum

No	Nama	Jabatan
1.	Tatin Suprihatin, S.H	Petugas pos bantuan hukum/ketua lembaga bantuan hukum
2.	Sri Iryani, S.H	Staf
3.	Mohammad Batra, S.H	Staf

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2021*

D. Gambaran Umum Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin akan persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”³². Adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang tidak mampu dalam kasus hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum ini pada pokoknya mengandung arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli untuk warga Negara yang memerlukannya untuk mewujudkan hak-hak serta mendapatkan perlindungan hukum yang wajar³³. Untuk mendukung jaminan atas hak konstitusional tersebut maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) yang menjadi dasar bagi suatu Negara untuk menjamin warga Negaranya khususnya kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk mendapat akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum³⁴.

Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dimana dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat

³² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³³ IGD Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm.26

³⁴ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm.65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang kurang mampu secara cuma-cuma dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Jika advokat tidak memberikan bantuan hukum sebagaimana mestinya maka advokat atau penasihat hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan wujud dari salah satu asas penting yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dipersidangan dianggap sebagai subjek bukan objek, dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan³⁵. Menjamin hak warga Negara untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan kewajiban suatu Negara. Dimana hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (11) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa masyarakat miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara³⁶.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang kovenan internasional hak-hak sipil dan politik mendukung dan mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas advokat, dimana memerintahkan Negara untuk memberikan dan menyediakan advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum secara efektif kepada masyarakat yang tidak mampu.

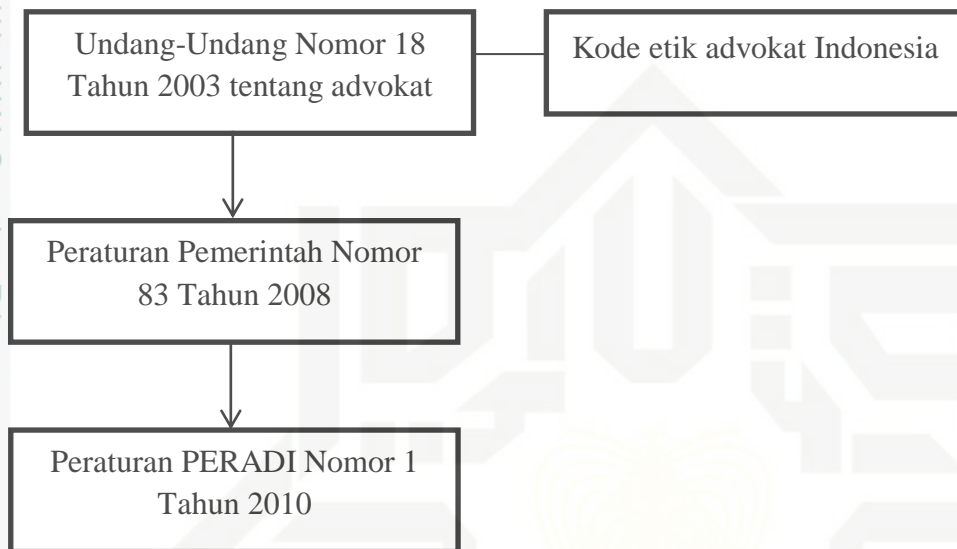
Untuk memenuhi tuntutan hak konstitusional tersebut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan

³⁵ Angga Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm.220

³⁶ Frans Hendra Winarta, Op. Cit, hlm.7-8

yang tidak mampu. Ini merupakan prinsip dari Negara hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Gambar II. 2
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Hukum



Sumber: *Jurnal Nirmala Many dan Ahmad Sofian (2020)*

Sejalan dengan Undang-Undang Tentang advokat, kode etik advokat Indonesia juga mengatur tentang *pro bono* atau tindakan secara cuma-cuma. Undang-Undang tentang advokat sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 22 ayat (1), oleh sebab itu Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2008 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Selanjutnya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI merupakan salah satu tujuannya untuk mengunggah dan melahirkan kesadaran individu advokat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tidak mampu³⁷. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan organisasi yang memiliki pusat bantuan hukum paling banyak di Indonesia, dengan 111 pusat bantaun hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.



³⁷ Nirmala Many dan Ahmad Sofian, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Penyelujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Volume 44, Nomor 3, Desember 2020, hlm.273-275

A. Negara Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum³⁸. Sistem hukum Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin akan persamaan dihadapan hukum dimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “*Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Hans Kelsen mengatakan bahwa Negara merupakan suatu tertib hukum atau suatu kesatuan tata tertib³⁹. Dalam konteks ini berkonotasi dengan pengertian Negara dari segi hukum/secara yuridis.

Defenisi lain mengenai Negara dikemukakan oleh Aristoteles bahwa Negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya⁴⁰. Maksudnya Negara hukum dimana dalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara.

³⁸ Nur Hidayat, *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm.196

³⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.140-141

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Rajawali Pers PT RajaGrafindo, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Max Weber⁴¹ Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Maka Negara sebagaimana dikemukakan tersebut akan semakin jelas. Jadi sebagaimana dikemukakan diatas, Indonesia sebagai Negara hukum yang ditandai dengan adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum.

Menurut Didi Nazmi⁴² Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi setiap warga negaranya. Maksudnya segala sesuatu kewenangan serta tindakan Negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum, dengan kata lain hukum yang mengatur. Hal ini mencerminkan keadilan bagi setiap kehidupan warga Negaranya.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro⁴³ mengatakan bahwa Negara hukum berarti suatu Negara yang di dalam wilayahnya terdapat:

1. Semua alat perlengkapan dari Negara, khususnya perlengkapan pemerintah dalam tindakan baik terhadap warga negaranya maupun dalam saling berhubungan.
2. Semua warga Negara/penduduk, dalam kehidupannya harus tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku.

Maka Negara hukum yang dikemukakan diatas akan semakin jelas dengan pendapat Aristoteles⁴⁴ bahwa gambaran Negara hukum yang dikaitkan dengan Negara zaman Yunani Kuno yang masih terikat pada polis.

⁴¹ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm.32

⁴² Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm.20

⁴³ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm.38

⁴⁴ Sarja, *Op.Cit*, hlm.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maksudnya Negara hukum dimana suatu wilayah berpendudukan yang urusan Negara dilakukan dengan musyawarah, seluruh warga Negeranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara. Dengan itu terwujudnya suatu Negara hukum yang tujuan dari Negara hukum tersebut adalah keadilan demi kesempurnaan warga negaranya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Negara hukum, hukum yang memegang amanat tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk norma yang berasal dari muatan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Ini menggambarkan bahwa begitu eratnya hubungan Negara hukum dan kerakyatan. Paham Negara hukum yang demikian dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi⁴⁵, oleh sebab itu prinsip supremasi hukum dan kedaulatan pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum⁴⁶. Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara yang merupakan

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm.88

⁴⁶ Sarja, *Op.Cit*, hlm.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cerminan dari jiwa bangsa Indonesia yang menjadi sumber hukum dari peraturan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara hukum untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggarakannya Negara hukum Indonesia.

B. Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Hak memperoleh bantuan hukum adalah hak mendasar bagi seseorang yang terkena maslaah hukum sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu⁴⁷ *“bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Ini adalah wujud dari Negara Indonesia adalah Negara hukum, terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya mempunyai arti bantuan hukum atau layanan bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli hukum untuk warga Negara yang memerlukannya untuk

⁴⁷ Jandi Mukianto, Op.Cit, hlm.105-106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar⁴⁸.

Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah seorang advokat yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia agar dapat hidup dengan sejahtera dan berkeadilan khususnya dalam lembaga peradilan. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku⁴⁹.

Memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum. Bantuan hukum juga merupakan salah satu wujud dari persamaan didepan hukum (*equality before the law*)⁵⁰. Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum dengan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kekayaan, politik dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan bebas biaya perkara, sidang di luar gedung Pengadilan, dan pos bantuan hukum Pengadilan di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴⁸ Angga Ridwan Arifin, Op. Cit, hlm.219

⁴⁹ Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm.106

⁵⁰ Ibid, hlm.113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pos bantuan hukum merupakan tempat pemberian layanan hukum yang tersedia pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang berupa informasi, konsultasi dan advokat hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Kehadiran pos bantuan hukum ini disebut juga sebagai sebuah terobosan penting yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep bantuan hukum yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Keberadaannya merupakan bentuk implementasi tanggung jawab Negara Indonesia sebagai Negara hukum⁵¹.

C. Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang terlampir pada Undang-Undang ini .

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu serta untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

⁵¹ Fauzan, *Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*, Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Volume 4, Nomor 2, 2017, hlm.129

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesehatan. Tapi, jika disalahgunakan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja sama dengan rapid dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional⁵². Karena itu Pemerintah berupaya untuk meminimalisir pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba, narkoba dibedakan kedalam 3 golongan yaitu⁵³:

1. Narkoba golongan I, Narkoba golongan ini disebut juga dengan narkoba alami yang berupa zat atau obat bisa dipakai langsung sebagai narkoba tanpa perlu proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya. Tanaman ini tidak boleh digunakan sebab merupakan salah satu dari jenis narkoba. Golongan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Tanaman ini berupa:

⁵² Shofia Nisra, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, *Wawancara*, 03 Mei 2021 di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

⁵³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tanaman *Papaver Somniferum L.*

b. Kokain

c. Opium mentah

d. Tanaman koka

e. Ganja

2. Narkotika golongan II, golongan ini disebut juga dengan narkotika semisintesis yakni zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi yang berkhasiat untuk pengobatan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini mempunyai potensi tinggi yang menimbulkan ketergantungan, seperti: Alfasetilmetadol, Betametadol, Metadona, dan lain sebagainya.

3. Narkotika golongan III, narkotika sintetis jenis ini merupakan proses yang bersifat untuk keperluan dalam bidang kesehatan dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Golongan ini memiliki potensi ketergantungan ringan, seperti: Etilmorfina, Kodeina, Polkodina, dan Propiram⁵⁴.

Kejahatan terhadap narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika⁵⁵ yang merupakan ketentuan khusus dimana didalamnya ditegaskan bahwa tindak pidana tersebut adalah sebuah kejahatan, jika narkotika tersebut digunakan diluar kepentingan yang sudah dijelaskan dan pemakaian secara tidak sah yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa seseorang.

⁵⁴ Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Op.Cit, hlm.55-67

Sementara itu, kejahatan terhadap narkoba ini merupakan suatu tindak pidana dimana pelanggaran yang mengancam keselamatan baik bagi pengguna maupun bagi masyarakat sekitar secara sosial baik fisik maupun jiwa bagi pemakai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian tentang pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB belum terlaksana secara efisien. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran penerima bantuan hukum di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah:
 - a. Faktor pendukungnya adalah penasihat hukum atau petugas di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB selalu siap untuk, memberikan layanan bantuan hukum dan melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor penghambatnya adalah beberapa masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai pos bantuan hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Ketidaktahuannya itu mengakibatkan penerima bantuan hukum tidak terlaksana secara efisien atau tidak tepat sasaran.

B. Saran

Untuk bisa ditetapkan pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkoba secara cuma-cuma berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB setelah melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam menentukan penerima layanan bantuan hukum khususnya pada kasus narkoba dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerima layanan bantuan hukum tepat sasaran.
2. Kepada masyarakat untuk bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan meningkatkan partisipasi dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai layanan bantuan hukum di Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992)
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Panduan Akademik*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2011)
- Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007)
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011)
- IGD Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung:CV. Media Fitrah Rabbani Komplek Villa Bandung Indah, 2011)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Rajawali Pers PT RajaGrafindo, 2010)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakrta: Sinar Grafika, 2009)
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Jurnal

- Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret 2015
- Angga Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen Vol.II, Nomor 4, Agustus 2013
- Fauzan, *Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*, Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Volume 4, Nomor 2, 2017
- Nirmala Many dan Ahmad Sofian, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Volume 44, Nomor 3, Desember 2020
- Nur Hidayat, *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017
- Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum Volume 1, Nomor 1, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Sumber Internet

<https://www.kamparkab.go.id>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2021, Jam 15.30 Wib

<https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-kampar>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2021, Jam 11.30 Wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar, Diakses pada tanggal 17 Mei 2021, Jam 09.00 Wib

<https://www.pn-bangkinang.go.id/>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2021, Jam 10.30 Wib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DATA PRIMER

BAB I	BENTUK DATA
A. Latar Belakang Masalah	- Yuanita Tarid, (Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB), Wawancara (<i>Pra Riset</i>), Tanggal 17 Desember 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB [hlm. 6]
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA	BENTUK DATA
1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?	- Yuanita Tarid. (Hakim), Wawancara. Tanggal 18 Desember 2020 [hlm. 44]
2. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?	- Shofia Nisra. (Hakim), Wawancara Tanggal 10 Mei 2021 [hlm. 43] - Tatin Suprihatin, (Petugas Pos Bantuan Hukum), Wawancara Tanggal 20 Mei 2021 [hlm. 44]
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan bantuan hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?	
4. Dasar hukum pemberian layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum?	
5. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam kasus Narkotika secara cuma-	- 3 (tiga) Data Putusan Kasus Narkotika di Pos Bantuan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cuma Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?	[hlm. 46]
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT POS BANTUAN HUKUM DALAM KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA	BENTUK DATA
1. Menurut ibu apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian kasus narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB?	- Tatin Suprihatin, (Petugas Pos Bantuan Hukum), Wawancara Tanggal 21 Mei 2021 [hlm. 59] - Tatin Suprihatin, (Petugas Pos Bantuan Hukum), Wawancara Tanggal 22 Mei 2021 [hlm. 60]

DATA SEKUNDER

BAB I	BENTUK DATA
A. Latar Belakang Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [hlm. 1] - Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [hlm. 1] - Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007) [hlm. 1] - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [hlm. 2] - Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) [hlm. 2] - Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017) [hlm. 2] - Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) [hlm. 2] - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Pemberian Bantuan Hukum diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu [hlm. 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita, Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung:CV. Media Fitrah Rabbani Komplek Villa Bandung Indah, 2011) [hlm. 4] - Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen Vol.II, Nomor 4, Agustus 2013 [hlm. 5]
<p>B. Tujuan dan Manfaat Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Panduan Akademik, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2011) [hlm. 8]
<p>C. Metode Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012) [hlm. 10] - Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1986) [hlm. 10] - Sarifuddin Azwar, <i>Metode Penelitian</i>, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) [hlm. 11]



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> - Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) [hlm. 12] - Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) [hlm. 12] - Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) [hlm. 13] - Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) [hlm. 13] - Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) [hlm. 15]
BAB II	BENTUK DATA
<p>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data diperoleh dari Profil Kabupaten Kampar Provinsi Riau [hlm. 19] - Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 [hlm. 21] - Data diperoleh dari Profil Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB [hlm. 21] - Data diperoleh dari Website Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tentang Pos Bantuan Hukum [hlm. 25] - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu [hlm. 26]
- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 [hlm. 28]
 - IGD Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) [hlm. 29]
 - Yusuf Saefudin, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Idea Hukum Volume 1, Nomor 1, 2015 [hlm. 29]
 - Angga Ridwan Arifin, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2 [hlm. 30]
 - Nirmala Many dan Ahmad Sofian, Bnatuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Maasyarakat Miskin Di Indonesia, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Volume 44, Nomor 3, Desember 2020 [hlm. 32]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	BENTUK DATA
A. Tinjauan Teoritis	<ul style="list-style-type: none"> - Nur Hidayat, Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017 [hlm. 33] - Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1998) [hlm. 33] - Ni'matul Huda, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Rajawali Pers PT RajaGrafindo, 2010) [hlm. 33] - Sarja, Negara Hukum Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016) [hlm. 34] - Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, (Padang: Angkasa Raya, 1992) [hlm. 34] - Andry Rahman Arif, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret 2015 [hlm. 37] - Fauzan, Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaam, Volume 4, Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	2, 2017 [hlm. 38] - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) [hlm. 39] - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika [hlm. 39] - Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [hlm. 40]
BAB IV	BENTUK DATA
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Bab 1 Pada Pasal 1 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan [hlm. 42] - Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB [hlm. 46]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Nama : Yuanita Tarid, S.H, M.H

Status : Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nama : Shofia Nisra, S.H, M.H

Status : Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB



Nama : Tatin Suprihatin, S.H

Status : Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMDAMPINGAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB"* yang ditulis oleh :

Nama : **HUSNAINI FITRI**
NIM : 11727201968
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua/Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris/Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji III
Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H

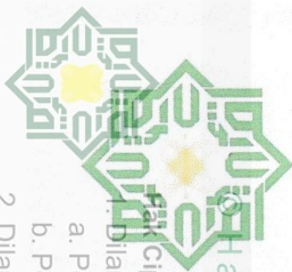
Penguji IV
Dr. H. Maghfirah, MA

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ditulis oleh saudara :

Nama : Husnaini Fitri

NIM : 11727201968

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat/19 Februari 2021

Narasumber : Basir, S.H.I, M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 01 Maret 2021
Narasumber

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Basir, S.H.I, M.H
NIP. 130217026

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ciptanya milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/3362/2021

Pekanbaru, 07 April 2021

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: HUSNAINI FITRI
NIM	: 11727201968
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/40718
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3362/2021 Tanggal 7 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

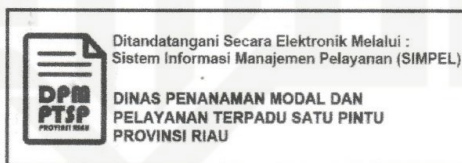
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HUSNAINI FITRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11727201968 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang Kode Pos 28412 Kab. Kampar Prop. Riau

Telp. (0762)20043 Fax. (0762)20043

Website: www.pn-bangkinang.go.id Email: pn_bkn@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.U7/1912 /HK03.V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : HUSNAINI FITRI;

NIM : 11727201968;

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU;

Jurusan : ILMU HUKUM;

Jenjang : S-1 Hukum;

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG;**

Lokasi : Pengadilan Negeri Bangkinang;

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Mei 2021 dengan judul **PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG;**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 27 Mei 2021

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Pih PANITERA

SOLVIATI, S.H., M.H.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

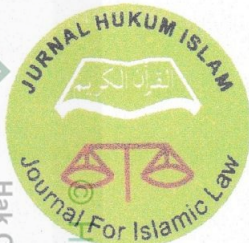
Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : HUSNAINI FITRI

NIM : 11727201968

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
PENDAMPINGAN KASUS NARKOTIKA SECARA CUMA-CUMA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
NEGERI BANGKINANG KELAS 1B**

Pembimbing: Dr. Nurhidayat, S.H, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Husnaini Fitri lahir di Kampar 13 Oktober 1997. Anak ke- dua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak H. Zainur, S.Pd dan Ibu Hj. Nurasni, S.Pd.I. Pada tahun 2011 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 006 Kampar Timur kemudian pada tahun 2014 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah di MTs N 4 Kampar Timur dan pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di SMA Muhammadiyah Pekanbaru . Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan mengambil Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun riwayat lain yang penulis tempuh, yaitu melakukan PKL di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do`a dan dukungan orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB” di bawah bimbingan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Senin 11 Oktober 2021 M/ 1443 H, penulis dinyatakan “LULUS” dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.